

125 Ribu Buruh Ancam Demo Tuntut UMK Naik 15 Persen

DEPOK (IM) - Ratusan ribu buruh Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mengancam menggelar unjuk rasa untuk memprotes pemerintah yang dianggap tidak tegas dalam meminta pengusaha mematuhi kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2024 sebesar 15 persen.

"Ratusan ribu buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja se-Kota Depok, Jabar, akan berunjuk rasa dan membentuk pagar betis di Kantor Wali Kota Depok, Jalan Margonda," ungkap Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, Wido Pratikno, Kamis (23/11). Menurutnya, tujuan dari aksi ini dilakukan untuk memprotes sikap ambigu pemerintah dan tekanan politik asosiasi pengusaha seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang dianggap berusaha menolak kenaikan upah minimum kota (UMK). "Tanggal 24 November (besok) kami akan mengadakan dialog dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok untuk membicarakan tuntutan buruh sekaligus menagih janji Pemerintah Kota Depok," katanya.

Dalam aksi unjuk rasa pada Kamis (16/11) kemarin, sambungnya, Pemerintah Kota Depok berjanji akan memfasilitasi tuntutan buruh sebagaimana harapan buruh. "Harapan dari

buruh UMK Kota Depok dinaikkan 15 persen dari Rp4.694.000 menjadi Rp5.300.000 per buruh per bulan," tandasnya. Apabila dalam dialog dengan jajarannya, pada Sabtu (25/11), diperkirakan sekitar 125.000 demonstran akan melakukan aksi lanjutan di Kantor Wali Kota Depok dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pabrik-pabrik dengan tuntutan agar pemerintah kota menaikkan UMK 15 persen dari upah lama Rp4.694.000 per bulan per buruh.

"Aksi tersebut juga dilakukan agar pemerintah tidak tunduk kepada tekanan-tekanan pengusaha," ujar Wido.

Lebih lanjut Wido mengatakan tuntutan kenaikan upah ratusan ribu buruh se-Kota Depok ini adalah fantastis mengingat harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM) yang terus meroket. "Jadi upah buruh sebesar Rp4.694.000 per bulan ini tidak cukup. Mayoritas buruh masih mengontrak belum lagi biaya hidup dan bayar uang sekolah anak," tukasnya. Di Kota Depok ada 6.000 perusahaan dengan jumlah karyawan 125.000 orang. "Dari 6.000 perusahaan itu terdapat 600 perusahaan besar yang mempekerjakan 50.000 karyawan," tutupnya. ● yan

BPN Kota Depok Kembali Raih Penghargaan Indra Gunawan: Ini Kado Indah Atas Kerja Keras Jajaran

FOTO: BPN Kota Depok



Perum Perumnas memberikan piagam penghargaan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Indra Gunawan, atas penerbitan sertifikat Perum Perumnas Proyek Transit Oriented Development (TOD) Pondok Cina, Kota Depok, Rabu (22/11).

DEPOK (IM) - Rabu 22 November 2023 kemarin, Perum Perumnas memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Indra Gunawan.

Penghargaan atas penerbitan sertifikat Perum Perumnas Proyek Transit Oriented Development (TOD) itu ditandatangani Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Sadewa Soediro yang diserahkan Ahmad Baihaqi Project Manager Madya RSKA Pondok Cina Semesta Mahata Margonda.

Untuk diketahui, Perum Perumnas Proyek TOD Pondok Cina merupakan salah satu proyek perumahan yang dikembangkan oleh Perum Perumnas di Kota Depok. Setelah groundbreaking pada 2 Oktober 2017 lalu, proses pembangunan proyek TOD sempat terhenti.

Proyek TOD tersebut mengintegrasikan perumahan dengan transportasi publik, khususnya kereta api yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan hunian yang nyaman, aman, dan terjangkau, serta mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Penerbitan sertifikat Perum Perumnas Proyek TOD Pondok Cina merupakan hasil kerja sama yang baik antara Perum Perumnas dan BPN Kota Depok.

"Ke depan sertifikat yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Depok ini menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pembeli rumah di proyek tersebut," ujar Indra Gunawan kepada wartawan, Rabu (22/11).

Dengan adanya sertifikat tersebut, sambung Indra, BPN Kota Depok menunjukkan komitmen terhadap Perum Perumnas yang selama ini menyediakan rumah huni-

an murah kepada masyarakat dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Indra Gunawan juga mengucapkan terima kasih atas penghargaan dan apresiasi yang diberikan oleh Perum Perumnas. Penghargaan ini berkat kerja keras, keuletan, dan ketelitian jajaran BPN Kota Depok dalam menerbitkan sertifikat.

BPN Kota Depok juga mengapresiasi kerja sama yang terjalin selama ini antara BPN Kota Depok dan Perum Perumnas.

Dalam pertemuan dengan jajaran Perum Perumnas, Indra Gunawan atas nama seluruh jajaran BPN Kota Depok mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang terbina selama ini, sehingga penerbitan sertifikat Perum Perumnas Proyek TOD Pondok Cina berjalan sesuai harapan.

Sementara itu, Ahmad Baihaqi menyampaikan secara langsung apresiasi kepada BPN Kota Depok atas penerbitan sertifikat Perum Perumnas Proyek TOD Pondok Cina.

Ia mengatakan bahwa sertifikat ini merupakan salah satu syarat penting untuk menjamin kepuasan pelanggan Perum Perumnas. Ia juga berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut di masa depan.

"Sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Indra Gunawan, sertifikat ini sangat penting bagi kami untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada para pembeli rumah di proyek ini nantinya. Dan kami sekali lagi berharap, kerja sama ini dapat terus berlanjut dan semakin baik di masa depan," tutur Ahmad Baihaqi. ● ber

4 | Metropolis

FOTO: ANTARA



PEMROV DKI BANGUN

10 JALAN TEMBUS
Pekerja mengoperasikan alat berat saat pengerjaan trotoar proyek jalan tembus K.H. Mas Mansyur – Jl.Jend. Sudirman, Jakarta, Kamis (23/11). Pemrov DKI Jakarta akan membangun 10 jalan tembus ([missing link](#)) pada 2023 hingga 2024 sebagai upaya mengurai kemacetan di DKI Jakarta.

Pj Gubernur DKI: Sanksi Pemecatan bagi ASN yang Tak Netral

Heru menekankan perlunya netralitas dari seluruh ASN di lingkungan Pemrov DKI menjelang Pemilu 2024. "Jelang pemilu saya minta hati-hati, kita semua, ASN, termasuk saya. Saya tidak pernah perintahkan macam-macam. Aturannya satu, netral. Kalau kita netral kan enak," kata Heru.

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memperingatkan aparatur sipil negara (ASN), termasuk camat dan lurah, bahwa ketidaknetralan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berakibat pada sanksi serius, termasuk pemecatan dari jabatan mereka.

"Sanksi bagi ASN yang tidak netral itu berupa teguran, lalu penundaan gaji, terus penurunan, bisa diberhentikan

dari jabatan. Jadi kalau dia lurah ya diberhentikan sebagai lurah," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/11).

Heru menekankan perlunya netralitas dari seluruh ASN di lingkungan Pemrov DKI menjelang Pemilu 2024.

"Jelang pemilu saya minta hati-hati, kita semua, ASN, termasuk saya. Saya tidak pernah perintahkan macam-macam. Aturannya satu, netral. Kalau kita netral kan enak," kata Heru.

Pantauan terhadap media sosial ASN juga menjadi fokus, sehingga Heru menegaskan bahwa netralitas mencakup larangan berfoto dengan gaya yang mirip atau mengarah pada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Heru menyarankan lurah, camat, dan ASN DKI untuk lebih memfokuskan diri pada pekerjaan, menjalankan program untuk membantu masyarakat, dan mematuhi aturan yang ada. Hal ini dianggap lebih penting daripada terlibat dalam hal-hal yang tidak perlu atau memberikan komentar sembarangan, dengan tujuan menciptakan kehidupan yang lebih tenang, aman, dan damai.

Heru juga mengingatkan Satpol PP untuk menertibkan atribut kampanye yang tidak sesuai tempatnya, dengan menekankan bahwa aturan

terkait penempatan atribut kampanye sudah diatur.

Lebih lanjut, Heru mengimbau kepada wali kota dan bupati agar melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mendukung suksesnya proses demokrasi di wilayah masing-masing.

Setidaknya, terdapat tiga peraturan hukum yang menegaskan kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2 menyatakan bahwa setiap pegawai ASN harus tunduk pada asas netralitas, dengan larangan berpihak dari segala bentuk pengaruh dan tanpa memihak kepada kepentingan tertentu.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mencakup ketentuan mengenai netralitas ASN. Sedangkan,

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, terdapat dua pasal yang mengatur tentang netralitas ASN, yaitu Pasal 70 dan Pasal 71.

Pasal 70 ayat (1) mengatur bahwa selama masa kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia.

Sementara itu, Pasal 71 ayat (1) menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Ini menciptakan kerangka hukum yang tegas guna menjamin netralitas ASN selama proses pemilihan. ● yan

Dandim 0501/JP Berkoordinasi dengan Kapolrestabes Jaga Kondusifitas Ibu Kota

JAKARTA (IM) - Dandim 0501/JP, Letkol Inf Bangun IE Siregar SH MIPOL menghadiri rapat koordinasi dan Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) Pemilu 2024 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat, di Hotel Swiss Bel Lt 1, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, (22/11).

Dalam sambutannya Dandim 0501/JP menyampaikan, sampai saat ini, "Saya dan Kapolrestabes Jakarta Pusat, setiap hari berkoordinasi dan bekerjasama menjaga kondusifitas wilayah Ibu Kota Negara Jakarta sebagai barometer bagi wilayah di Indonesia," kata Dandim.

Selanjutnya Dandim 0501/JP juga menjelaskan kenapa penting TNI dan Polri menjaga kondusifitas wilayah agar roda perekonomian dan pemerintahan serta aktivitas



masyarakat berjalan dengan lancar," jelas Dandim.

Pada kesempatan itu Letkol Inf Bangun IE Siregar berharap mulai pelaksanaan kampanye serentak sampai dengan Pemilu selesai kondisi wilayah Jakarta tetap aman dan kondusif. Untuk itu kepada seluruh Ketua Parpol dan seluruh KPU serta komponen lainnya solid,

saling berkomunikasi dan bekerjasama agar wilayah Jakarta Pusat tetap terjaga kondusifitasnya serta jangan mudah menerima berita hoax maka itu gunakan aplikasi berita hoax yang sudah ada di situs resmi Kominfo," tegas Dandim.

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua KPU Jakarta Pusat, Efnidiansyah MS

yang dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada para peserta rapat yang telah hadir mengikuti acara

Koordinasi dan Sosialisasi Aplikasi Sikadeka Pemilu 2024 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

"Aplikasi Sikadeka ini berkaitan langsung dengan apa yang menjadi tujuan

kita bersama, pada saat masa kampanye, saat kontestasi berjalan, silaturahmi kita sudah terjalin maka semua berjalan dengan tertib lancar sesuai dengan aturan yang ada, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dengan adanya sistem ini kita berharap semua peserta pemilu dapat melaksanakan dan juga berkomunikasi dengan baik, untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan itu dapat terwujud harus dimulai dari kita semua,"ujarnya.

"Insya Allah, memudahkan kita KPU dapat menjalankan amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan KPU berada pada garis terdepan untuk menjaga netralitas dan juga menjaga kondisi kita tentu saja dibantu oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Aparatur Kepolisian dan juga TNI," pungkasnya. ● ber

Dandim 0501/JP Dampingi Heru untuk Perbaikan Rumah Warga



JAKARTA (IM) - Komandan Kodim 0501/JP, Letkol Inf Bangun IE Siregar SH MIPOL mendampingi Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam rangka kunjungan kerja perbaikan rumah dalam rangka penataan pemukiman, di RW.12,

Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Turut hadir pula Plt Kadis Perumahan Rakyat dan Pemukiman Pemprov DKI, Retno Sulistyanningrum, Asisten Pembangunan dan Linnkungan Hidup, Sekda

Prov DKI Jakarta, Ir. Afan Adriansyah Idris, Kepala Biro Sekda Prov. DKI Jakarta, Sigit Pratama Yudha, para Dewan Kota Jakarta Pusat, Kapolsek Johar Baru Kompol Ubaidillah SH MA, Camat Johar Baru Nurheli Savitri, MA, Lurah se-Kelurahan Johar Baru serta

Yayasan Bunda Suci.

Kegiatan ini merupakan program untuk menyediakan hunian layak bagi warga. Adapun perbaikan rumah sebanyak 8 rumah bagi warga di RW. 12 Kel.Tanah Tinggi, Johar Baru.

Dalam kesempatan ini Plt Gubernur DKI Jakarta mengucapkan terimakasih kepada yayasan Buddha Tzu Chi yang telah memperhatikan kondisi dari warga masyarakat, de-

ngan mendukung perbaikan dan penataan hunian bagi warga masyarakat.

Sementara Dandim 0501/JP menyampaikan agar warga masyarakat yang telah mendapat perbaikan tempat tinggalnya, untuk nantinya selalu menjaga, merawat serta memperhatikan kebersihan lingkungan sehingga warga dapat tinggal dihunian dengan sehat, nyaman dan harmonis, pungkasnya. ● ber

PT Mega Inter Distrindo Berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan")

PERBERTAHUAN

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 20 November 2023 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 03 tertanggal 21 November 2023, dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui mengkonversi sejumlah utang Perseroan kepada PT Pyridam Farma Tbk menjadi setoran saham dalam Perseroan, yang selanjutnya meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp 50.000.000,- menjadi Rp 505.000.000,-.

Pembertitahuan ini dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1999 tanggal 25 Februari 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikomponisasikan sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 24 November 2023
Direksi
PT Mega Inter Distrindo